



Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang: Analisis Teori Peran Biddle & Thomas dan Logic Model Yin

The Role of the Social Services Department in Handling Neglected Elderly People in Karawang Regency: An Analysis of Biddle & Thomas' Role Theory and Yin's Logic Model

Vierra Pramuliawati¹, Evi Priyanti², Haura Atthahara³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Karawang, Indonesia
2210631180046@student.unsika.ac.id, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id,
haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian kualitatif studi kasus ini menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanganan lansia terlantar melalui teori peran Biddle & Thomas (harapan, norma, penampilan, dan sanksi). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara Terstruktur menggunakan teknik logic model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis fondasi pelayanan telah kuat, namun implementasinya di lapangan masih mengalami kesenjangan dan polarisasi output. Pada dimensi harapan dan norma, terjadi asimetri informasi dan diskoneksi ekspektasi di mana panti swasta mitra belum menerima stimulasi anggaran atau logistik secara merata. Pada dimensi penampilan peran, program advokasi hak sipil dan jaminan kesehatan sudah berjalan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kendala klasik birokrasi, seperti keterbatasan anggaran, pemutakhiran data terpadu yang belum akurat, dan minimnya armada penjangkauan wilayah pelosok. Akibatnya, pada dimensi sanksi, mekanisme pengawasan bulanan dinilai masih mandek pada tataran administratif di atas meja. Dinas Sosial Karawang perlu mereformasi strategi dari pendekatan pasif birokratis menjadi proaktif melalui gerakan jemput bola bersama pengurus RT/RW, mengonversi skema bantuan triwulanan menjadi bulanan, serta membangun transparansi regulasi demi mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lansia terlantar. Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari riset ini terletak pada integrasi teoretis antara Teori Peran Biddle & Thomas dengan kerangka kausalitas *Logic Model* Robert K. Yin yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks tata kelola birokrasi sosial di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Teori Peran, Perlindungan Sosial, Tata Kelola Pemerintah Daerah, Pengabaian Lansia.

Abstract

This qualitative case study research analyzes the role of the Karawang Regency Social Services Department in handling neglected elderly people through Biddle & Thomas's role theory (expectation, norms, performance, and sanctions). Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. Subsequently, the collected data was structured and analyzed using the logic model technique. The results indicate that while the service foundation is legally strong, its implementation in the field still suffers from gaps and output polarization. In the expectations and norms dimensions, information asymmetry and disconnect in expectations occur, wherein partner private nursing homes have not received equitable budget stimuli or logistics. In the role performance dimension, civil rights advocacy and health insurance programs have been implemented, but their effectiveness is hindered by classic bureaucratic obstacles, such as budget constraints, inaccurate integrated data updates, and a lack of outreach

vehicles for remote areas. Consequently, in the sanction dimension, the monthly oversight mechanism is deemed to be stagnant at the desk-level administrative stage. The Karawang Social Services Department needs to reform its strategy from a passive bureaucratic approach to a proactive one through a "jemput bola" (active outreach) movement with RT/RW officials, convert the quarterly assistance scheme into a monthly one, and establish regulatory transparency to achieve equitable social justice for all neglected elderly people. The scientific novelty of this research lies in the theoretical integration of Biddle & Thomas's Role Theory with Robert K. Yin's Logic Model causality framework, which has never been previously applied in the context of social bureaucracy governance in Karawang Regency.

Keywords: Role Theory, Social Protection, Local Government Governance, Elderly Neglect.

I. PENDAHULUAN

Fenomena penuaan penduduk (*ageing population*) kini telah menjadi tren global yang melanda berbagai belahan dunia. Pergeseran demografi ini pun menjelma sebagai salah satu tantangan paling krusial yang menuntut perhatian serius dari berbagai negara. Dana Populasi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) menyatakan bahwa penuaan populasi merupakan isu global yang harus diperhatikan. Saat ini, dunia tengah mengalami peningkatan jumlah serta proporsi penduduk lanjut usia. Perserikatan Bangsa-bangsa mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 703 juta individu yang masuk dalam kategori lansia (United Nations, 2019).

Mengingat besarnya jumlah penduduk yang dimiliki, Indonesia secara otomatis menempatkan diri sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di skala global. Dengan besarnya area dan jumlah penduduk yang banyak, berbagai isu di Indonesia juga sangat beragam. Mirip dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia sering kali mengalami berbagai masalah yang terkadang dapat menghalangi perkembangan negara. Salah satu isu yang cukup serius adalah masalah sosial yang sangat besar Indonesia saat ini menghadapi masalah yang semakin mendesak yaitu bertambahnya populasi lanjut usia (lansia) yang tidak menerima perawatan atau bantuan yang cukup. Situasi ini mengakibatkan banyak lansia yang terabaikan, hidup dalam kesendirian, kekurangan kebutuhan dasar, dan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan (Aini, 2024).

Kesejahteraan hidup masyarakat yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas atau lansia diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 1998. Regulasi ini memandang lansia sebagai fase akhir dari kehidupan manusia yang membutuhkan perhatian serta proteksi lebih. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya nyata untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka agar kebutuhan sosial, kesehatan, dan ekonominya tetap terfasilitasi dengan baik.

Penelantaran lanjut usia masih sering terjadi, terutama di daerah perkotaan, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kurangnya dukungan dari keluarga, keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta ketiadaan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan dan kesehatan lansia, termasuk meningkatnya risiko masalah psikologis seperti depresi. Menyikapi kondisi tersebut, kolaborasi aktif dan sinergi

dari seluruh elemen pemangku kepentingan (*stakeholders*) mutlak diperlukan, khususnya keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, agar para lansia dapat memperoleh bantuan dan layanan yang memadai serta kualitas hidup mereka dapat meningkat (Ananda, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut usia sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi hak maupun kewajiban. Selain itu, para lanjut usia juga tetap memiliki potensi, pengalaman, serta kemampuan yang dapat terus dikembangkan, sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas.

Lansia yang dibiarkan tanpa perawatan mengalami tantangan berat seperti kekurangan gizi, masalah kesehatan yang tidak mendapatkan perhatian, dan kurangnya interaksi sosial. Kekurangan gizi dapat berakibat pada lemahnya sistem imun dan penyusutan otot, yang pada gilirannya memperburuk keadaan kesehatan. Kondisi kesehatan yang tidak diobati, seperti penyakit kronis yang tidak diketahui, dapat merusak kualitas hidup dan meningkatkan kemungkinan kematian lebih cepat (Aini, 2024).

Tabel 1. Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Jenis PPKS	No.	Jenis PPKS
1	Anak Balita Terlantar	14.	Kelompok Minoritas
2	Anak Terlantar	15.	Bekas Warga Binaan Permasyarakatan
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	16.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
4	Anak Jalanan	17.	Orang Penyalahgunaan NAPZA
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	18.	Korban Trafficking
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	19.	Korban Tindak Kekerasan
7	Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
8	Lanjut Usia Terlantar	21.	Korban Bencana Alam
9	Penyandang Disabilitas	22.	Korban Bencana Sosial
10	Tuna Susila	23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
11	Gelandangan	24.	Fakir Miskin

No.	Jenis PPKS	No.	Jenis PPKS
12	Pengemis	25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
13	Pemulung	26.	Komunitas Adat Terpencil

Sumber: Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa salah satu kategori Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang tua yang terlantar. Mereka digolongkan sebagai Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena memenuhi kriteria permasalahan sosial, seperti kemiskinan, serta memiliki kondisi kehidupan yang tidak layak menurut standar kemanusiaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2012, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial harus dilakukan melalui program yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kesejahteraan sosial bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mencakup individu, keluarga, kelompok, serta komunitas masyarakat.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia tengah memasuki era penuaan penduduk. Pada tahun 2025, jumlah warga berusia 60 tahun ke atas diperkirakan menyentuh angka 33,8 juta jiwa atau setara dengan 12% dari total populasi. Tren peningkatan ini diprediksi akan terus melonjak tajam hingga mencapai 65,82 juta jiwa pada tahun 2045.

Tabel 2. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Fasilitas Dalam Panti Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Bandung	62	65	65	64	65	62
Kab. Bandung Barat	14	12	1	11	11	19
Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	2
Kab. Bekasi	1	1	1	1	1	3
Kab. Bogor	14	14	11	12	12	24
Kab. Ciamis	0	0	0	0	0	3
Kab. Cianjur	3	3	3	3	3	7
Kab. Cirebon	7	7	7	8	8	7
Kab. Garut	23	27	27	31	26	28
Kab. Indramayu	1	1	1	1	1	2
Kab. Karawang	25	26	26	26	27	26

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Majalengka	2	2	2	2	2	3
Kab. Pangandaran	2	2	2	2	2	1
Kab. Purwakarta	6	6	6	6	4	4
Kab. Subang	4	4	4	4	4	7
Kab. Sukabumi	27	4	4	4	28	11
Kab. Sumedang	6	6	6	6	6	5
Kab. Tasikmalaya	0	0	0	4	0	3
Kota Bandung	79	70	75	69	75	74
Kota Banjar	0	0	0	1	1	2
Kota Bekasi	14	14	14	14	12	10
Kota Bogor	13	15	15	15	17	23
Kota Cimahi	15	13	13	13	13	17
Kota Cirebon	3	3	3	3	3	7
Kota Depok	11	11	11	11	9	6
Kota Sukabumi	27	30	4	4	6	32
Kota Tasikmalaya	4	4	4	4	4	1

Sumber: OPEN DATA JABAR tentang Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Fasilitas di Dalam Panti Kewenangan Provinsi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tingginya angka lansia yang tidak terurus di wilayah Jawa Barat sejauh ini masih menempati urutan teratas dalam daftar urgensi masalah sosial yang menuntut penanganan mendesak. Berdasarkan data dari Open Data Jabar, masih terdapat ribuan lansia di Jawa Barat yang hidup dalam kondisi terlantar, baik karena faktor ekonomi, keterbatasan keluarga, maupun minimnya akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah lansia terus meningkat, tidak seluruhnya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam penanganannya.

Adapun jumlah lansia terlantar yang tercatat oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Lansia Terlantar Kabupaten Karawang

Kecamatan	Jumlah
Banyusari	336
Batujaya	420
Ciampel	3
Cibuaya	447
Cikampek	157

Kecamatan	Jumlah
Cilamaya Kulon	256
Cilamaya Wetan	302
Cilebar	100
Jatisari	561
Jayakarta	503
Karawang Barat	178
Karawang Timur	191
Klari	115
Kota Baru	166
Kutawaluya	463
Lemahabang	644
Majalaya	111
Pakisjaya	189
Pangkalan	667
Pedes	856
Purwasari	312
Rawamerta	375
Rengasdengklok	498
Tegalwaru	566
Telagasari	215
Telukjambe Barat	128
Telukjambe Timur	847
Tempuran	128
Tirtajaya	1.055
Tirtamulya	370
Total	11.198

Sumber: Pendataan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial 2026

Data Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah lanjut usia terlantar di Kabupaten Karawang masih tergolong cukup tinggi dan menjadi permasalahan sosial yang belum sepenuhnya tertangani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak lansia yang hidup dalam keterbatasan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun dukungan keluarga. Banyaknya lansia terlantar tersebut tidak hanya mencerminkan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan ini.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Dinas Sosial Kabupaten Karawang, pada tahun 2025 telah diadakan program bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk para lansia yang terlantar di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek. Program ini yaitu salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup lansia terlantar melalui pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut selain itu berfokus pada aspek fisik, namun mencakup penguatan mental, spiritual, dan sosial, sehingga para lansia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, sehat, dan bermartabat.

Kasus yang dialami oleh Kyai Slamet (76) di Kabupaten Karawang, yang hidup seorang diri tanpa keluarga dalam kondisi sakit, tidak terurus, serta mengalami keterbatasan fisik dan penurunan kondisi mental hingga akhirnya harus dievakuasi oleh Dinas Sosial, menjadi gambaran nyata bahwa permasalahan lanjut usia terlantar masih terjadi di tengah masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pelayanan sosial bagi lansia belum sepenuhnya optimal, sehingga dibutuhkan perhatian, penanganan, serta kebijakan yang lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah daerah (Adhi, 2025).

Tindak lanjut segera dari Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tirtajaya, Ali Koeswara, atas pengaduan mengenai seorang wanita lanjut usia berinisial SM (68) yang ditemukan dalam keadaan bingung di Desa Bolang., melalui langkah identifikasi biometrik untuk memastikan identitas serta koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karawang hingga proses evakuasi ke rumah singgah guna mendapatkan perawatan dan pendampingan, menunjukkan bahwa penanganan lanjut usia terlantar memerlukan kecepatan, ketepatan, serta sinergi yang kuat antarinstansi agar kebutuhan dasar dan perlindungan sosial lansia dapat terpenuhi secara optimal (Kita, 2025).

Berdasarkan informasi yang dilansir melalui akun Instagram resmi Dinas Sosial Kabupaten Karawang pada tahun 2026 lansia terlantar ditemukan di wilayah Sukabumi dan diketahui merupakan warga Kabupaten Karawang. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Karawang hadir untuk memberikan pendampingan serta memastikan hal dan perlindungan sosial, proses penanganan akan dilanjutkan dengan reunifikasi bersama keluarga sebagai upaya memulihkan fungsi sosial dan mengembalikan lansia ke lingkungan yang aman, layak, dan penuh kepedulian.

Jumlah lanjut usia terlantar di Kabupaten Karawang cukup tinggi dan berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Sosial, namun permasalahan lansia terlantar masih terus ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dalam penanganan lansia terlantar.

Untuk membedah kompleksitas kesenjangan antara kebijakan pelayanan dan realitas penelantaran lansia tersebut, penelitian ini mengadopsi pisau analisis teori peran (*role theory*) yang dikembangkan oleh Biddle & Thomas. Konstruksi teoretis ini membagi evaluasi fungsional aktor birokrasi ke dalam

empat dimensi operasional yang saling berkaitan, yaitu harapan peran (*role expectation*), norma peran (*role norm*), penampilan peran (*role performance*), serta sanksi peran (*role sanction*). Kerangka konseptual ini dinilai relevan dan sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa keberhasilan penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangat bergantung pada konsistensi aparaturnya daerah dalam menerjemahkan regulasi normatif ke dalam tindakan teknis di lapangan (Biddle dan Thomas, 1966).

Berdasarkan garis haluan teoritis tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini diarahkan pada analisis komprehensif mengenai kontribusi struktural serta kendala fungsional Dinas Sosial Kabupaten Karawang melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dalam mengeksekusi perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar. Secara lebih rinci, hal-hal yang diteliti dalam kajian ini meliputi pemetaan ekspektasi publik terhadap instansi sosial, sinkronisasi program kerja lokal dengan standar nasional, realisasi nyata pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar lansia di lapangan, hingga identifikasi hambatan administratif yang memicu sanksi peran berupa tidak optimalnya penanganan di tingkat akar rumput.

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dirinci untuk menguraikan secara mendalam tingkat kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan aktualisasi program penanganan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan fisik, mental, maupun spiritual yang telah diberikan, sekaligus merumuskan solusi strategis atas hambatan koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran guna memulihkan fungsi sosial dan kesejahteraan para lanjut usia di Kabupaten Karawang.

Penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar di Provinsi Jawa Timur menggunakan teori Jim Ife (2008), yang mencakup peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Keberhasilan program ini didukung oleh tenaga profesional, lingkungan kondusif, dan kerja sama antarinstansi, namun terhambat oleh minimnya dukungan keluarga, keterbatasan daya tampung, SDM, serta anggaran. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani lansia terlantar beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokus dan fokus penelitian; penelitian terdahulu mengkaji peran Dinas Sosial secara umum di tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini berspesifikasi pada pelayanan di dalam panti sosial di Kabupaten Karawang dengan menekankan analisis kondisi aktual serta kendala nyata di lapangan (Putri, 2023).

Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis lansia di panti jompo Kota Parepare menunjukkan bahwa lansia di sana memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang relatif baik berkat aktivitas positif seperti olahraga, kegiatan rohani, dan pelatihan keterampilan yang mampu meningkatkan kebahagiaan serta mengurangi kesepian. Faktor penentunya meliputi penerimaan diri, hubungan sosial, otonomi, dan dukungan lingkungan. Persamaan dengan

penelitian ini terletak pada subjek lanjut usia dan penggunaan pendekatan kualitatif yang mendalam. Sementara perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada aspek psikologis internal lansia di panti jompo, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada peran institusional Dinas Sosial dalam menangani lansia terlantar, di samping perbedaan lokasi dan objek kajian (Kade, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Melalui metode kualitatif berdesain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam menangani masalah lansia terlantar. Studi ini membatasi ruang lingkupnya secara ketat pada lokus dan lini masa kegiatan tertentu, yang mana seluruh data dikodifikasi secara komprehensif dalam batas waktu yang ditentukan.

Informasi yang dikaji bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berupa fakta autentik yang digali langsung dari informan kunci melalui wawancara tatap muka. Untuk memilih narasumber tersebut, digunakan teknik purposive sampling agar informan yang terpilih benar-benar memiliki tugas pokok, fungsi (tupoksi), dan kontribusi nyata terhadap efektivitas program penanganan lansia di lembaga tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran dokumen, instrumen hukum, naskah akademik, serta rilis data berkala pada situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pada penelitian ini menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas. Fokus utama mereka adalah pada interaksi antara individu dengan harapan lingkungan sekitarnya (Biddle dan Thomas, 1966).

Adapun indikator peran:

- Harapan Peran (*Role Expectation*): Tuntutan atau kewajiban dari masyarakat/organisasi terhadap pemegang posisi.
- Norma Peran (*Role Norms*): Aturan formal (hukum) maupun informal yang membatasi perilaku peran.
- Penampilan Peran (*Role Performance*): Tindakan nyata atau perilaku aktual individu di lapangan.
- Sanksi Peran (*Role Sanctions*): Respon lingkungan (penghargaan atau hukuman) atas perilaku yang ditunjukkan.

Cara pengumpulan data dilakukan secara terencana di lapangan melalui integrasi tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi: Melakukan pengamatan langsung guna merekam pola perilaku, interaksi, dan dinamika aktivitas subjek di lokus penelitian.
2. Wawancara: Menggunakan pendekatan semi-terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) untuk mengeksplorasi perspektif, rekam pengalaman, dan opini subjektif informan secara mendalam.

3. Dokumentasi: Mengumpulkan materi tertulis, laporan tahunan lembaga, regulasi, dan dokumentasi visual sebagai instrumen konfirmasi untuk memastikan akurasi data.

Tempat penelitian ini difokuskan di Kabupaten Karawang, dengan objek utama Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jl. Husni Hamid No. 3, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Seluruh rangkaian pengumpulan data dan aktivitas lapangan ini dilaksanakan dalam waktu penelitian pada penelitian ini di bulan April hingga Mei tahun 2026.

Pada penelitian ini penulis memerlukan informasi melalui informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial, Pengurus Panti Swasta, dan perwakilan masyarakat RT/RW.

Selanjutnya, cara analisis data yang diimplementasikan dalam riset ini menggunakan teknik *logic model* dari Robert K. Yin. Teknik ini dipilih untuk menguraikan dan menelaah hubungan sebab-akibat peran Dinas Sosial secara sistematis dari waktu ke waktu melalui empat tahapan logis, yaitu:

1. *Input*: Menganalisis sumber daya manusia, anggaran, serta regulasi kebijakan yang dimiliki Dinas Sosial.
2. *Aktivitas*: Menelaah bentuk program nyata seperti pendataan, penjangkauan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.
3. *Output*: Melihat hasil langsung seperti ketersediaan data lansia dan jumlah individu yang memperoleh layanan.
4. *Outcome*: Mengukur dampak jangka menengah berupa berkurangnya jumlah lansia terlantar serta meningkatnya kemandirian mereka.

Proses analisis akhir dilakukan dengan cara mencocokkan (*pattern matching*) antara temuan empiris yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan urutan logis yang diprediksi dalam *logic model* tersebut guna memperkuat kesimpulan penelitian.

Landasan teoretis utama yang digunakan dalam riset ini adalah Teori Peran dari Biddle dan Thomas (1966), yang berfokus pada interaksi individu dengan harapan lingkungan melalui empat indikator utama: Harapan Peran (*Role Expectation*), Norma Peran (*Role Norms*), Penampilan Peran (*Role Performance*), dan Sanksi Peran (*Role Sanctions*). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *Logic Model* dari Robert K. Yin yang menguraikan hubungan sebab-akibat secara sistematis dari waktu ke waktu melalui tahapan *Input*, *Aktivitas*, *Output*, dan *Outcome*. Proses analisis akhir dilakukan dengan teknik pencocokan pola (*pattern matching*) antara temuan empiris di lapangan dengan urutan logis yang diprediksi dalam model tersebut. Penelitian ini secara khusus menegaskan bahwa kombinasi Teori Peran Biddle & Thomas dan Logic Model Yin belum pernah diterapkan pada Kabupaten Karawang, sehingga pendekatan integratif ini memegang peran krusial sebagai kebaruan ilmiah (*novelty*) utama dalam membedah tata kelola birokrasi sosial di Kabupaten Karawang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jl. Husni Hamid No. 3, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Sosial memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor sosial. Instansi ini bertanggung jawab penuh atas penyediaan layanan, jaminan, dan perlindungan sosial bagi warga Karawang, khususnya kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Fokus penanganan diarahkan pada populasi rentan yang menghadapi disfungsi sosial dan keterbatasan ekonomi, seperti orang tua terlantar, anak terlantar, tunawisma, serta penyandang disabilitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Karawang mengemban berbagai peran strategis, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang Berdasarkan Harapan Peran

Pemenuhan kebutuhan dasar sosial bagi lansia terlantar merupakan inti dari harapan peran yang diemban oleh Dinas Sosial. Ekspektasi terhadap pelayanan dan penanganan ini tidak sekadar menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, melainkan juga representasi dari aspirasi masyarakat. Publik menuntut adanya perlindungan nyata serta perhatian khusus bagi kelompok lansia yang rentan secara ekonomi maupun sosial ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Agus Kurnia, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Dinas Sosial, kami melihat bahwa pemerintah daerah dan masyarakat memiliki harapan besar agar Dinas Sosial mampu hadir sebagai garda terdepan dalam penanganan lansia terlantar. Harapan tersebut mencakup penyediaan layanan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kesejahteraan lansia secara berkelanjutan. Dengan tujuan memiliki target utama yang ingin dicapai adalah menurunnya jumlah lansia terlantar, meningkatnya kualitas hidup lansia, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial diharapkan mampu menjadi pihak utama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada lanjut usia terlantar melalui berbagai program kesejahteraan sosial.

Adapun hasil wawancara bersama Hj. Marwati, SST., MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai harapan pimpinan dan masyarakat terhadap rehabilitasi sosial lansia, beliau menyampaikan bahwa:

“Harapan pimpinan dan masyarakat kami terjemahkan dalam bentuk program rehabilitasi yang responsif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemulihan fungsi

sosial lansia. Tujuan utama kami yaitu meningkatkan kualitas hidup lansia terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi sosial.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harapan pemerintah dan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia terlantar agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Asep Riyadi, S.Tr.Sos selaku pekerja sosial, diketahui bahwa harapan masyarakat terhadap Dinas Sosial dalam penanganan lansia terlantar masih sangat tinggi. Beliau menyampaikan bahwa:

“Masyarakat sejauh ini ketika ada lansia terlantar mereka sangat berharap untuk mendapatkan bantuan secara langsung dari dinas sosial. Masyarakat masih beranggapan bahwa Ketika ada lansia yang tidak diurus pasti ujung-ujungnya pengen minta ke dinas sosial padahal ketika ada lansia tidak diurus tetapi lansia itu masih punya keluarga itu sebetulnya masih tanggung jawab dari pihak lingkungan dan keluarga tersebut yang masih ada, jadi tidak serta merta lansia mendapatkan bantuan dari dinas sosial, yang dibantu oleh dinas sosial itu lansia terlantar, dan lansia yang dalam keadaan fakir miskin atau kekurangan jadi seperti itu jika ingin mengadukan bantuan yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten karawang. Tujuan utama yang pasti memberikan keberfungsian sosial orang tersebut kembali lagi, jadi tujuannya yaitu memanuiakan manusia kan lansia terlantar tidak mendapatkan kepengurusan, tidak mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan makan, minum, nah kita memberikan hak-haknya, memberikan pelayanan, dan kebutuhan pokoknya.”

Selanjutnya, hasil wawancara bersama Nanik selaku Ketua Panti Gerbang Emas Anak Raja juga menunjukkan adanya harapan terhadap peran Dinas Sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar. Beliau menyampaikan bahwa:

“Dinas sosial itu harus terjun langsung membantu orang tua yang layak untuk ditolong, orang tua yang tidak mampu, orang tua yang sudah tidak punya penghasilan, itu wajib ditolong. Saat ini lansia itu butuh tempat tinggal dan makan, kalau pengobatan itu bisa menyusul namun kalau tempat tinggal itu untuk berteduh dan berlindung. Dan sampai saat ini panti kami belum pernah diberi bantuan sama sekali.”

Hasil wawancara dengan kepala panti menunjukkan bahwa Panti Gerbang Emas Anak Raja sampai saat ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang walaupun panti tersebut sudah menjadi mitra Dinas Sosial sejak 03 Oktober 2025.

Selain itu, masyarakat dan lanjut usia terlantar juga berharap adanya pemberian bantuan sembako secara rutin setiap bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia terlantar, terutama bagi lansia yang tidak memiliki keluarga ataupun saudara yang merawat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa lansia masih bergantung pada bantuan tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Meskipun bantuan sosial seperti BLT dan sembako sudah diberikan, masyarakat menilai bantuan tersebut belum diterima secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu, masyarakat berharap Dinas Sosial Kabupaten Karawang dapat lebih memperhatikan kebutuhan lansia, baik dari segi makanan bergizi, pakaian, maupun kondisi kesehatan agar kesejahteraan lanjut usia terlantar dapat terpenuhi dengan baik.

Selain bantuan sosial, lanjut usia terlantar juga berharap Dinas Sosial dapat terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan survei secara berkala terhadap kondisi lansia terlantar. Menurut masyarakat, kunjungan langsung dari Dinas Sosial penting dilakukan agar kondisi dan kebutuhan lansia dapat diketahui secara nyata serta penanganan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang Berdasarkan Norma Peran

Penanganan lanjut usia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang sepenuhnya bersandar pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Regulasi tersebut berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan prioritas aksi serta mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan sosial yang sudah berjalan. Dasar hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan prosedur administratif di lapangan.

Adanya kebijakan dan regulasi dalam penanganan lanjut usia terlantar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperjelas tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia terlantar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Kurnia, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan dan regulasi menjadi landasan utama dalam penanganan lansia terlantar, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat dan terarah. Dasar pelaksanaan antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, kebijakan tentang lanjut usia, serta peraturan daerah yang mengatur pelayanan sosial. Kami memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan melalui monitoring, evaluasi berkala, serta pengawasan internal.”

Adapun hasil wawancara Bersama Hj. Marwati, SST., Sos beliau menjelaskan bahwa:

“Pedoman teknis mengacu pada kebijakan Kementerian Sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi, Sosial Lanjut Usia serta aturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2022. Pelaksanaan program diawasi melalui monitoring dan evaluasi rutin agar kegiatan berjalan sesuai rencana, tujuan dapat tercapai dengan baik, serta kendala yang muncul dapat segera diperbaiki.”

Kebijakan dan regulasi yang jelas menjadi dasar penting agar program penanganan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dapat berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, pekerja sosial setempat, Asep Riyadi, S.Tr.Sos., mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan tugas penanganan tersebut wajib tunduk dan patuh pada kode etik profesi pekerja sosial. Kode etik tersebut menjadi pedoman agar pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak penerima pelayanan sosial. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pekerja sosial itu kode etiknya sampai ada 17 kode etik, mungkin yang bisa saya sebutkan hanya beberapa saja ya salah satunya ketika ada lansia kita itu harus menjaga kerahasiaan dari nama, bahkan dari alamatpun harus menjaga kode etik tersebut, kita juga menjaga kode etik serta merta penerimaannya itu harus memang berdasarkan fakta jangan sampai kita menerima karna atas balas kasihan, kita memberikan pelayanan atas dasar unsur paksaan dari pihak manapun itu gaada jadi kode etik itu, ketiga kita harus rasa tanggung jawab terhadap lansia tersebut. Saya memastikan ketika memberikan pelayanan sesuai SOP, ketika memberikan pelayanan tidak ada aturan yang berbenturan dan kita tidak memaksakan lansia tersebut untuk satu dapat pelayanan atau dapat program dari pemerintah yang pasti memastikan pekerjaan itu harus kejangka juga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pekerja sosial berupaya menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan memperhatikan kode etik profesi, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta memastikan bahwa program pelayanan sosial dapat menjangkau lanjut usia yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Sebagai Ketua Panti Gerbang Emas Anak Raja, Nanik menjelaskan bahwa sampai saat ini pihak panti belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang meskipun panti tersebut telah menjadi mitra Dinas Sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar. Beliau juga menyampaikan bahwa pihak panti kurang mengetahui secara jelas mengenai aturan maupun kebijakan yang mengatur pemberian bantuan kepada panti sosial. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau panti dikami belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial, dan kalau bahas aturan saya tidak tahu peraturannya seperti apa. Karena seharusnya kami sebagai mitra juga seharusnya diberi bantuan oleh dinas sosial namun sampai saat ini dinas sosial belum pernah memberi bantuan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kerja sama antara Dinas Sosial dengan panti sosial, khususnya terkait pemberian bantuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang berlaku. Pihak panti berharap adanya perhatian dan dukungan dari Dinas Sosial agar pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di panti dapat berjalan dengan lebih optimal.

Agus selaku Ketua RT Kalikalapa, dan Nunung selaku masyarakat Cikampek menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Namun Karyonisan sebagai Ketua RT Adiarsa Pusaka berpendapat dalam pelaksanaannya masyarakat masih menilai bahwa penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya merata dan adil bagi seluruh lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut disampaikan oleh Karyonisan yang menyatakan bahwa:

“Belum adil karna ada bansos juga ga nentu terus ada yang dapet ada yang ngga, ga merata begitu.”

Selain itu, Karyonisan juga menilai bahwa pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki kekurangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia terlantar. Sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Kalau dari prosedur masih kurang kalau dari bantuan bantuan sehari-hari, termasuk kesehatan juga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun bantuan sosial telah berjalan sesuai aturan, masyarakat masih berharap adanya pemerataan bantuan serta peningkatan pelayanan sosial, khususnya terkait kebutuhan sehari-hari dan kesehatan lanjut usia terlantar di Kabupaten Karawang.

Nano selaku lanjut usia di Panti Gerbang Emas Anak Raja menjelaskan bahwa bantuan dan perhatian dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang dinilai masih belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan oleh lanjut usia yang berada di panti sosial. Beliau juga menyampaikan bahwa selama tinggal di panti, dirinya belum pernah melihat secara langsung kedatangan pihak Dinas Sosial ke panti tersebut. Beliau menyampaikan bahwa:

“Belum adil dan merata, belum baik mungkin ya karna memang saya disini sudah hampir 3-4 tahun belum pernah lihat orang dinas sosial kesini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lanjut usia di Panti Gerbang Emas Anak Raja masih berharap adanya perhatian dan kunjungan langsung dari Dinas Sosial agar kondisi serta kebutuhan lansia di panti dapat diketahui secara langsung dan mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Hasil wawancara dengan Mince selaku lanjut usia di Panti Gerbang Emas Anak Raja dan Karni selaku lanjut usia terlantar di Adiarsa Pusaka menunjukkan bahwa keduanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari para lanjut usia terlantar.

Bantuan tersebut dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia, terutama bagi lansia yang memiliki keterbatasan ekonomi dan

tidak memiliki keluarga yang merawat. Meskipun demikian, para lanjut usia masih berharap agar bantuan yang diberikan dapat dilakukan secara rutin dan merata sehingga kesejahteraan lanjut usia terlantar dapat lebih diperhatikan.

3. Peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang Berdasarkan Penampilan Peran

Dinas Sosial Kabupaten Karawang terus memacu efektivitas berbagai program pelayanan demi menangani masalah lansia terlantar. Hal ini sejalan dengan keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Agus Kurnia, S.Sos., yang menyatakan bahwa: “Secara umum, pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam cakupan layanan dan keterbatasan sumber daya. Namun demikian, berbagai upaya perbaikan dan penguatan koordinasi terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan layanan dapat menjangkau sasaran secara lebih optimal.”

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang juga menjelaskan bahwa:

“Program yang telah dilakukan meliputi bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan di panti, serta bantuan berbasis keluarga. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat fungsi sosial keluarga, serta memberikan perlindungan dan pendampingan bagi kelompok yang membutuhkan.”

Data wawancara menunjukkan penanganan lansia terlantar telah diwujudkan dalam berbagai pelayanan sosial. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh tiga faktor utama: anggaran yang minim, data penerima bantuan yang kurang akurat, serta lemahnya dukungan keluarga dan partisipasi publik. Namun menurut Hj. Marwati, SST., MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan program rehabilitasi sosial di lapangan dilakukan melalui pendekatan secara langsung kepada lanjut usia serta keluarganya agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lansia. Beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan program di lapangan dilakukan melalui pendekatan langsung kepada lansia dan keluarganya.”

Selain itu, Hj. Marwati, SST., MM juga menjelaskan mengenai hasil dan dampak dari pelaksanaan program sosial, bantuan, serta pendampingan yang telah dilakukan terhadap lanjut usia terlantar. Beliau menyampaikan bahwa:

“Dampak program terlihat pada peningkatan kondisi sosial dan kesejahteraan lansia. Lansia menjadi lebih aktif, merasa diperhatikan, dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial memberikan dampak positif terhadap

kondisi sosial dan kesejahteraan lanjut usia terlantar, terutama dalam meningkatkan perhatian sosial, interaksi sosial, serta kualitas hidup lansia di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanganan lanjut usia terlantar, pekerja sosial memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi, pendataan, hingga pemberian pelayanan sosial kepada lansia terlantar. Proses pelaksanaan program dilakukan secara bertahap agar bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi lanjut usia terlantar di lapangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Asep Riyadi, S.Tr.Sos selaku pekerja sosial yang menyampaikan bahwa:

“Pertama identifikasi dilokasi dari identitas, kebutuhan, dari dia layak atau tidak, kedua tahap eksekusi yaitu tahap penjemputan untuk mengantarkan ke panti itu yang harus dibawa ke panti. Nah untuk yang sekedar diberi bantuan sembako itu identifikasi, layak atau tidak, identifikasinya cukup lewat RT, RW, masyarakat sekitar, dan meminta data ke desa jadi cukup seperti itu langsung kita memberikan bantuan.”

Selain itu, Asep Riyadi, S.Tr.Sos juga menjelaskan bahwa dalam penanganan lanjut usia terlantar, proses pelayanan diawali dari adanya laporan masyarakat kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi lansia tersebut. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pertama mendapatkan laporan, kedua ketika mendapatkan laporan kita kesana langsung untuk mencari tahu layak atau tidak, dan kita melihat lansia ini sudah tertib administrasi atau belum karena ini terlantar, biasanya yang terlantar itu tidak ada identitas nah kita bantu membuatkan identitas, kita juga membekali dia untuk dibuatkan kartu jaminan sosial, dan kesehatannya yaitu karawang sehat, jadi kita bikinkan juga untuk askes kalau sakit untuk bisa dimasukkan ke panti, biasanya panti juga minta seperti itu identitas jelas dan jaminan kesehatannya.”

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanganan lanjut usia terlantar dilakukan melalui proses identifikasi, pendataan, pengecekan kondisi lapangan, serta pemenuhan administrasi dan jaminan sosial bagi lansia terlantar. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan dan bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan serta mempermudah proses pelayanan lanjutan seperti penempatan ke panti sosial dan pelayanan kesehatan.

Namun, tidak seluruh pihak merasakan secara langsung pelaksanaan program maupun pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Hal tersebut disampaikan oleh Nanik selaku Ketua Panti Gerbang Emas Anak Raja yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak pernah merasakan program apapun dari dinas sosial.”

Selain itu, Nanik juga menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial masih dinilai kurang baik, khususnya terhadap panti sosial yang menjadi tempat penampungan lanjut usia terlantar. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kurang baik, karena memang tempat kami ini seharusnya mendapatkan bantuan atau pelayanan dari dinas namun kenyataannya kami belum pernah merasakan pelayanan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak panti masih berharap adanya perhatian, bantuan, dan pelayanan langsung dari Dinas Sosial terhadap panti lansia yang menangani lanjut usia terlantar.

Sementara itu, menurut masyarakat program yang paling dirasakan manfaatnya adalah program BLT, bantuan sosial, dan PKH lansia. Namun, dari sisi pelayanan sosial masyarakat masih menilai bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Karyonosan selaku Ketua RT Adiarsa Pusaka yang menyatakan bahwa:

“Masih kurang ya menurut saya karna memang saya memiliki harapan bahwa pelayanan dinas sosial itu terjun langsung untuk melihat keadaan lansia.”

Dapat diketahui bahwa masyarakat berharap Dinas Sosial dapat lebih aktif melakukan kunjungan langsung ke lapangan agar kondisi lanjut usia terlantar dapat diketahui secara nyata serta pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Mince selaku lanjut usia di Panti Gerbang Emas Anak Raja dan Karni selaku lanjut usia terlantar di Adiarsa Pusaka menunjukkan bahwa keduanya pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang berupa bantuan sosial, BLT, dan PKH lansia. Bantuan tersebut dinilai cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para lanjut usia.

Selain itu, Karni juga menjelaskan bahwa dirinya pernah mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan secara gratis melalui program kesehatan yang diberikan pemerintah. Bantuan tersebut membantu lansia dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan ketika mengalami sakit atau membutuhkan pengobatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program bantuan sosial dan pelayanan kesehatan dari Dinas Sosial cukup dirasakan manfaatnya oleh sebagian lanjut usia terlantar, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan.

Namun berbeda dengan Nano selaku lanjut usia di Panti Gerbang Emas Anak Raja yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Beliau menjelaskan bahwa:

“Belum karna saya dari kecil tinggal di Karawang sampai sekarang masuk panti belum pernah mendapatkan bantuan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat lanjut usia terlantar yang belum merasakan bantuan maupun pelayanan sosial dari Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar dinilai belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan peningkatan dalam pendataan serta penjangkauan pelayanan di lapangan.

4. Peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang Berdasarkan Sanksi Peran

Dalam pelaksanaan program penanganan lanjut usia terlantar, evaluasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas program serta mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Agus Kurnia, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang menyampaikan bahwa:

“Jika program tidak berjalan sesuai rencana, akan dilakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian strategi program. Langkah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi, memperbaiki mekanisme pelaksanaan, serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pada periode berikutnya.”

Selain itu, Hj. Marwati, SST., MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial juga menjelaskan bahwa:

“Konsekuensi jika program tidak optimal berupa evaluasi kinerja dan perbaikan sistem. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelemahan yang ada dapat diperbaiki sehingga pelaksanaan program berikutnya menjadi lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program penanganan lanjut usia terlantar.

Selanjutnya, Asep Riyadi, S.Tr.Sos selaku pekerja sosial menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan secara rutin melalui briefing dan pertemuan kerja setiap bulan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ada evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali, kita selalu ada briefing, pertemuan, evaluasi setiap bulannya apakah sudah mencapai target pekerjaan kita, apakah kita sudah memberikan respon yang baik terhadap setiap aduan di masyarakat itu pasti di evaluasi oleh atasan.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui pencapaian target kerja serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan lanjut usia terlantar.

Adapun Nanik selaku Ketua Panti Gerbang Emas Anak Raja berharap adanya peningkatan perhatian dan kerja sama dari Dinas Sosial terhadap panti sosial yang menjadi mitra dalam penanganan lansia terlantar. Beliau menyampaikan bahwa:

“Dinas sosial harus lebih memperhatikan kemitraan seperti kami, karena kami berdiri sendiri dengan mengandalkan donatur dari luar saja, saya juga ingin banyak belajar dari dinas sosial atau bertukar pikiran untuk menjalankan kesosialan saya menjaga atau merawat lansia.”

Sementara itu, masyarakat juga memberikan saran agar Dinas Sosial Kabupaten Karawang lebih proaktif dalam melakukan survei langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan RT setempat untuk mengetahui jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan. Selain itu, masyarakat berharap adanya program bantuan rutin setiap bulan karena bantuan yang diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sekali dinilai masih kurang dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia terlantar.

Lanjut usia terlantar juga berharap adanya kunjungan langsung dari pihak Dinas Sosial ke tempat tinggal maupun panti sosial agar kondisi lansia dapat diketahui secara langsung. Menurut lansia, kunjungan tersebut penting sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap keadaan lanjut usia terlantar sehingga bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

IV. KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam menangani lansia terlantar secara yuridis sudah kuat, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan antara kebijakan internal dan realitas lapangan. Pada aspek harapan dan norma, terdapat diskoneksi ekspektasi serta asimetri informasi, di mana mitra panti swasta merasa belum mendapat bantuan logistik yang adil dan masyarakat mengeluhkan skema distribusi triwulanan yang kurang stabil. Penampilan peran dinas pun mengalami polarisasi; advokasi hak sipil (KTP dan kartu Karawang Sehat) sudah berjalan, tetapi belum merata akibat kendala klasik birokrasi seperti keterbatasan anggaran dan ketidakakuratan data terpadu di wilayah pelosok. Akibatnya, pada dimensi sanksi, pengawasan internal bulanan dinilai masih mandek pada tataran administratif di atas meja dan belum mampu menyembuhkan distorsi pelayanan bagi ekosistem eksternal secara nyata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Karawang perlu mereformasi strateginya dari pendekatan pasif di belakang meja menjadi pendekatan proaktif di lapangan. Dinas disarankan mengintensifkan gerakan jemput bola melalui survei periodik bersama pengurus RT/RW guna memutakhirkan data secara riil dan mencegah adanya lansia yang luput dari jangkauan program. Selain itu, skema bantuan triwulanan sebaiknya dikonversi menjadi bantuan rutin bulanan untuk menjaga stabilitas kualitas hidup lansia rentan. Terakhir, dinding asimetri informasi harus diruntuhkan melalui sosialisasi regulasi yang transparan, pengawasan fisik secara berkala, serta penyaluran stimulasi anggaran yang inklusif kepada panti-panti swasta mitra demi mewujudkan asas keadilan sosial yang merata. Keterbatasan penelitian kualitatif studi kasus ini terletak pada sifat temuannya yang bersifat kontekstual sehingga tidak dapat digeneralisasi (*non-generalizable*) ke daerah lain, karena sangat bergantung pada kebijakan, anggaran, dan kondisi spesifik Dinas Sosial Kabupaten Karawang beserta panti swasta mitranya. Ruang lingkup objeknya pun terbatas hanya pada penanganan lansia terlantar, tanpa memotret problematika sosial lainnya. Selain itu, kedalaman analisis dalam penelitian ini

memiliki keterbatasan aksesibilitas data makro akibat adanya asimetri informasi di wilayah pelosok, sehingga pemetaan kendala lapangan sangat bergantung pada subjektivitas serta kejujuran data yang disampaikan oleh para informan kunci pada saat penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., et al. (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hardani, dkk. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Moleong. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiyatomoko, J. (2007). Sosiologi: Memahami dan mengkaji masyarakat. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Soekanto, S. (2002). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutarto. (2009). Teori peran (konsep, deviasi dan implikasinya). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (1997). Kepemimpinan dalam organisasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Aisyah, R.N dkk. (2020). Kepedulian Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 9(2).
- Ananda, F. (2020). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Berdasarkan Potensial Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Upaya Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone).
- Kade, S.S. (2024). Kesejahteraan Psikologis Lansia Di Panti Jompo Kota Parepare.
- Lanteda, dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Putri, F.E. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitas Sosial Lansia Terlantar Di Provinsi Jawa Timur.

- Putri, N. (2024). Analisis Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Uma Oma Cafe).
- Sholekah, F. (2025). Hubungan Dukungan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang Dan Wening Wardoyo.
- United Nations. (2019). *World Population Ageing 2019: Highlights*.
- Ziraluo, F.S.R.S. (2022). Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Kabupaten Karawang
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Adhi. (2025). Lansia Terlantar di Karawang Dievakuasi Dinsos, Hidup Sebatang Kara dan Sakit. https://beritapasundan.com/lansia-terlantar-di-karawang-dievakuasi-dinsos-hidup-sebatang-kara-dan-sakit/#google_vignette
- Aini, M.Z. (2024). Lanjut Usia Terlanta: Isu yang Meningkat di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/muthiazulfaaini8146/6653e06a34777c5d6e563d12/lanjut-usia-terlantar-isu-yang-meningkat-di-indonesia>
- Deakin University Library. (2026). *Artifact / artefact*. Dalam *Qualitative study designs: Glossary*. <https://deakin.libguides.com/qualitative-study-designs/glossary>
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (2025). Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima fasilitas di dalam panti kewenangan provinsi berdasarkan kabupaten/kota. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-lanjut-usia-terlantar-yang-menerima-fasilitas-di-dalam-panti-kewenangan-provinsi-berdasarkan-jenis-fasilitas-di-jawa-barat>
- Hadizan, R. (2025). Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya: Panduan Lengkap dan Contoh Nyata. <https://www.sosiologiku.com/2025/03/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html>
- Kita, N. (2025). Respon Cepat Kesos Kecamatan Tirtajaya Evakuasi Lansia Terlantar. <https://narasikita.id/respon-cepat-kesos-kecamatan-tirtajaya-evakuasi-lansia-terlantar/>
- Rini, R.A.P. (2025). Jumlah Lansia Tembus 33,8 Juta Jiwa, Indonesia Menuju Era Penduduk Menua. <https://www.tribunnews.com/seleb/7767851/jumlah-lansia-tembus-338-juta-jiwa-indonesia-menuju-era-penduduk-menua>
- Setiawan. (2024). Etika dalam penelitian kualitatif. https://www.researchgate.net/profile/Indriani-Ismail/publication/385387199_Etika_Dalam_Penelitian_Kualitatif/Links/6722f9dddb208342dede870e/Etika-Dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQILCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.